

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Digital Bagi Penyandang Disabilitas

Novi Hidayat¹, Ziyadi Ali Ikromi²

Universitas Sains Indonesia

novi.hidayat@lecturer.sains.ac.id, ziyadi.ali@lecturer.sains.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital dasar bagi penyandang disabilitas sebagai upaya pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pelatihan dilaksanakan selama tiga bulan di Kecamatan Babelan dengan melibatkan 30 peserta dari berbagai jenis disabilitas. Menggunakan pendekatan Community-Based Participatory Approach (CBPA) dan prinsip Universal Design for Learning (UDL), kegiatan ini menyesuaikan metode dan alat bantu dengan kebutuhan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 86,7% peserta mengalami peningkatan kemampuan signifikan, terutama dalam mengetik dokumen, membuat email, dan menjelajah internet. Selain itu, pelatihan juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial peserta melalui peningkatan kepercayaan diri dan terbentuknya komunitas belajar digital mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan digital yang inklusif dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi pada penyandang disabilitas. Namun, tantangan berupa keterbatasan perangkat dan akses internet masih perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor. Artikel ini merekomendasikan perluasan dan replikasi pelatihan sejenis guna mendukung agenda pembangunan masyarakat yang lebih inklusif.

Keywords: *disabilitas, keterampilan digital, pelatihan inklusif, pemberdayaan, CBPA, UDL*

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang secara historis mengalami ketimpangan akses dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Ketidaksetaraan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fisik atau sensorik, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang tidak inklusif. Hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sering kali bersifat sistemik, seperti kurangnya infrastruktur ramah disabilitas dan minimnya kesadaran masyarakat umum terhadap pentingnya kesetaraan akses. Akibatnya, penyandang disabilitas kerap tertinggal dalam hal pengembangan potensi diri dan pencapaian sosial-ekonomi. Mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan mobilitas sosial. Bahkan di lembaga pendidikan formal, penyandang disabilitas sering menghadapi diskriminasi dan kurangnya dukungan pedagogis yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang menyeluruh untuk menjamin hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

World Health Organization (2023) mencatat bahwa lebih dari satu miliar orang di dunia hidup dengan berbagai bentuk disabilitas, yang mencakup disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tinggal di negara berkembang dan menghadapi tantangan ganda, yakni keterbatasan fisik dan hambatan struktural. WHO juga menyoroti bahwa disabilitas bukan semata-mata persoalan individu, melainkan hasil interaksi kompleks antara kondisi kesehatan seseorang dan hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Bentuk diskriminasi yang mereka alami tidak selalu bersifat langsung, tetapi juga bisa hadir dalam bentuk pengabaian, kebijakan yang tidak adaptif, atau sistem layanan yang tidak inklusif. Misalnya, sistem transportasi umum yang tidak ramah disabilitas menghambat mobilitas harian mereka. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kali dikucilkan dari aktivitas sosial dan ekonomi yang seharusnya dapat mereka akses. Diskriminasi struktural inilah yang membuat upaya pemberdayaan menjadi semakin penting.

Di Indonesia, ketimpangan tersebut tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas hanya mencapai sekitar 45%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat umum yang mencapai 70%, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap dunia kerja. Salah satu penyebab utama rendahnya angka partisipasi tersebut adalah kurangnya pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum siap untuk menerima pekerja disabilitas, baik karena prasangka maupun karena tidak adanya fasilitas pendukung. Hal ini berdampak langsung terhadap tingkat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, yang pada akhirnya memperbesar ketergantungan mereka terhadap keluarga atau institusi sosial. Ketimpangan ini tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi intervensi yang menggabungkan aspek pelatihan keterampilan dengan advokasi kebijakan inklusi.

Pada era transformasi digital, keterampilan teknologi informasi menjadi salah satu modal utama untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Teknologi memberikan peluang baru bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan daring, pekerjaan berbasis digital, dan layanan publik secara lebih mandiri. Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, mereka harus terlebih dahulu memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi. Sayangnya, banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan digital yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan biaya, kurangnya pelatih yang memahami pendekatan inklusif, serta fasilitas pelatihan yang tidak ramah disabilitas. Ketimpangan digital ini disebut sebagai digital divide, yang tidak hanya mencerminkan

perbedaan dalam akses teknologi, tetapi juga dalam kemampuan menggunakananya secara efektif (Kusnanto et al., 2021). Untuk itu, pelatihan digital inklusif menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Studi Kusnanto et al. (2021) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali diabaikan dalam program literasi digital nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat umum tidak cukup untuk menjamin keterlibatan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pelatihan harus dirancang dengan pendekatan yang responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta, baik dari segi metode, alat bantu, maupun materi. Selain itu, keberhasilan pelatihan juga sangat tergantung pada lingkungan belajar yang mendukung, termasuk adanya dukungan moral dan emosional dari fasilitator. Oleh karena itu, konsep Universal Design for Learning (UDL) sangat relevan diterapkan dalam pelatihan semacam ini. UDL memberikan fleksibilitas dalam penyampaian materi dan evaluasi pembelajaran, sehingga semua peserta dapat belajar secara optimal, terlepas dari kondisi fisik atau kognitif mereka (Meyer et al., 2014). Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan ruang belajar yang lebih inklusif dan partisipatif.

Pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu strategi nyata yang dapat menjembatani kesenjangan keterampilan digital bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan pelatihan berbasis komunitas, masyarakat akademik dapat langsung berinteraksi dan memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif, bukan objek bantuan, kegiatan pengabdian akan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Selain memberikan keterampilan teknis, kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan yang memperkuat rasa percaya diri dan identitas sosial peserta. Hal ini penting karena pemberdayaan tidak hanya terkait dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan pengakuan terhadap martabat dan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Program pelatihan yang partisipatif juga berpotensi membangun jejaring sosial antarpenyandang disabilitas yang bisa mendukung keberlanjutan pasca pelatihan. Oleh karena itu, pendekatan pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dengan strategi pembangunan inklusif secara lebih luas.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan digital dasar. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis peserta, tetapi juga mendorong kemandirian dan partisipasi aktif mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan memiliki keterampilan digital, penyandang disabilitas dapat lebih mudah mengakses informasi, berkomunikasi, mencari peluang kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Inisiatif ini juga diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap kemampuan penyandang disabilitas, sehingga stigma negatif dapat berkurang. Dalam jangka panjang, pelatihan semacam ini berpotensi mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih inklusif dan adil. Untuk mewujudkannya,

kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan, termasuk antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan sektor swasta. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian semacam ini harus terus direplikasi dan dikembangkan dalam skala yang lebih luas.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama periode tiga bulan, dimulai pada Januari dan berakhir pada Maret 2025. Lokasi kegiatan bertempat di Kecamatan Babelan. Lokasi ini dipilih karena memiliki fasilitas dasar yang memadai serta dukungan dari pemerintah setempat dalam menyukseksan program pelatihan digital. Proses perencanaan kegiatan melibatkan koordinasi intensif dengan pengelola pusat layanan dan organisasi penyandang disabilitas lokal. Selain itu, dilakukan pemetaan kebutuhan awal peserta untuk memastikan materi pelatihan relevan dan sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini penting agar intervensi yang dilakukan bersifat tepat guna dan memberikan dampak jangka panjang bagi peserta. Penentuan waktu pelaksanaan juga mempertimbangkan jadwal kegiatan peserta agar mereka dapat mengikuti pelatihan secara konsisten.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Community-Based Participatory Approach (CBPA), sebuah pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif komunitas sasaran dalam seluruh tahapan kegiatan. CBPA diyakini mampu meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan hasil pelatihan karena peserta turut serta dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi program (Israel et al., 2013). Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dua arah antara fasilitator dan peserta sehingga kebutuhan mereka benar-benar terakomodasi. Dalam konteks ini, peserta tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam proses pemberdayaan. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih kontekstual dan bermakna, sesuai dengan prinsip inklusi dan partisipasi. Libatan komunitas juga memperkuat relasi sosial antar penyandang disabilitas, yang bisa menjadi sumber dukungan selama dan setelah pelatihan. Ini penting untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan digital yang mereka hadapi.

Peserta kegiatan ini terdiri dari 30 orang penyandang disabilitas dengan latar belakang disabilitas yang beragam, yaitu sensorik (tunanetra dan tuli), fisik (tunakarya), serta intelektual ringan. Seleksi peserta dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas lokal dan tenaga pendamping sosial. Kriteria seleksi tidak hanya berdasarkan jenis disabilitas, tetapi juga mencakup tingkat motivasi, ketersediaan waktu, dan kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Proses seleksi bertujuan untuk memastikan bahwa peserta yang dipilih memiliki kesiapan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan optimal. Selain itu, dilakukan asesmen awal terkait kemampuan teknologi peserta untuk menentukan titik awal pengajaran. Beragamnya jenis disabilitas dalam kelompok peserta mendorong fasilitator untuk menyesuaikan metode penyampaian materi yang adaptif. Hal ini sejalan dengan prinsip pelatihan inklusif yang

menjunjung keberagaman sebagai aset, bukan hambatan.

Materi pelatihan disusun secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pengenalan perangkat komputer, pengoperasian dasar sistem operasi, hingga penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Word dan Excel. Selain itu, peserta juga dikenalkan pada akses internet yang meliputi penelusuran informasi, pembuatan akun email, serta penggunaan media sosial secara bijak dan aman. Tujuan dari pelatihan ini adalah membekali peserta dengan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjelajahi dunia digital dan memanfaatkannya secara produktif. Materi disusun dalam 12 sesi pelatihan, masing-masing berdurasi 2 jam, dan disampaikan dua kali seminggu agar peserta memiliki waktu untuk memahami dan mempraktikkan materi secara bertahap. Setiap sesi disertai dengan praktik langsung dan didampingi oleh fasilitator dan asisten yang sudah dibekali pelatihan inklusif sebelumnya. Dalam menyusun kurikulum pelatihan, fasilitator mengacu pada pendekatan Universal Design for Learning (UDL) yang fleksibel dan akomodatif (Meyer et al., 2014). Hal ini bertujuan agar materi dapat diakses oleh semua peserta tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran, atau motorik.

Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dilakukan dengan menggunakan dua metode utama, yaitu pre-test dan post-test, serta observasi partisipatif selama sesi berlangsung. Pre-test digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta sebelum pelatihan, sedangkan post-test dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan kemampuan setelah pelatihan selesai. Hasil dari kedua tes ini dibandingkan untuk melihat sejauh mana pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan teknologi digital. Observasi partisipatif dilakukan oleh tim fasilitator untuk mencatat dinamika selama pelatihan, termasuk partisipasi aktif peserta, hambatan yang muncul, serta strategi yang berhasil. Selain itu, peserta juga diminta mengisi kuesioner refleksi diri untuk mengetahui persepsi mereka terhadap proses dan hasil pelatihan. Evaluasi ini bersifat formatif dan sumatif, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan program ke depan. Dengan evaluasi yang komprehensif, pelatihan diharapkan tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis peserta.

Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan digital peserta pelatihan yang berasal dari berbagai latar belakang disabilitas. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat perubahan yang nyata dalam penguasaan teknologi dasar. Dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan secara penuh, sebanyak 26 orang atau sekitar 86,7% menunjukkan peningkatan skor post-test lebih dari 30% dibandingkan pre-test. Hal ini menunjukkan bahwa materi dan metode pelatihan yang digunakan berhasil menjawab kebutuhan belajar peserta secara efektif. Selain itu, pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan praktis memungkinkan peserta memahami dan menguasai keterampilan baru dengan lebih percaya diri. Partisipasi aktif peserta juga menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan ini, karena mereka tidak

hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan praktik langsung. Peningkatan ini memperkuat asumsi bahwa dengan pendekatan inklusif yang tepat, penyandang disabilitas mampu bersaing dalam keterampilan digital dasar.

Indikator peningkatan keterampilan yang paling menonjol terlihat pada tiga aspek utama: mengetik dokumen sederhana, membuat akun email, dan menggunakan mesin pencari internet. Sebanyak 90% peserta mampu menyusun dokumen menggunakan Microsoft Word, seperti surat lamaran kerja atau daftar riwayat hidup, yang sebelumnya belum mereka kuasai. Sebanyak 85% peserta berhasil membuat dan mengoperasikan akun email secara mandiri, yang merupakan syarat dasar dalam berbagai aktivitas daring. Kemampuan menggunakan mesin pencari seperti Google juga meningkat, dengan 80% peserta dapat mencari informasi dasar seperti tutorial video atau lowongan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membuka akses peserta terhadap sumber-sumber informasi yang bermanfaat. Penguasaan keterampilan tersebut menjadi bekal penting bagi peserta untuk mulai membangun kemandirian dalam konteks digital. Ini juga mencerminkan kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan aktual peserta.

Selain peningkatan kognitif dan teknis, dampak psikologis positif juga tercatat selama dan setelah pelatihan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara terbuka dan kuesioner persepsi diri, mayoritas peserta melaporkan adanya peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Sebelumnya, banyak peserta merasa takut atau canggung ketika berhadapan dengan perangkat digital, terutama komputer dan internet. Namun setelah mengikuti pelatihan secara konsisten, rasa percaya diri mereka meningkat seiring dengan keberhasilan dalam menguasai tugas-tugas teknologi dasar. Bahkan, beberapa peserta menyatakan mulai mengajarkan anggota keluarga atau teman mereka mengenai penggunaan perangkat digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan telah mendorong terjadinya efek multiplikatif di tingkat komunitas. Peningkatan rasa percaya diri ini merupakan modal sosial penting yang mendukung keberlanjutan hasil pelatihan di luar ruang kelas.

Tidak hanya aspek individu, dampak sosial juga menjadi salah satu keberhasilan utama dari kegiatan pengabdian ini. Setelah pelatihan berakhir, peserta secara mandiri membentuk komunitas belajar digital berbasis WhatsApp. Grup ini digunakan untuk saling bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan daring, kursus digital gratis, serta tips menggunakan aplikasi tertentu. Inisiatif ini muncul dari peserta sendiri tanpa arahan langsung dari fasilitator, yang menunjukkan terbangunnya kemandirian sosial dan solidaritas antar anggota kelompok. Komunitas ini menjadi ruang berbagi yang suportif, di mana peserta merasa aman untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Hal ini memperkuat ikatan sosial antar penyandang disabilitas yang sebelumnya mungkin merasa terisolasi dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan komunitas ini menjadi bukti bahwa pelatihan telah memberikan dampak jangka panjang yang melampaui aspek kognitif semata.

Dengan terbentuknya komunitas belajar dan meningkatnya kemampuan serta kepercayaan diri peserta, pelatihan ini memberikan kontribusi penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas secara menyeluruh. Dampak kegiatan tidak hanya tercermin dalam angka peningkatan hasil tes, tetapi juga dalam transformasi sosial yang terjadi di antara peserta. Program ini juga membuktikan bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang pasif, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang bila diberikan akses dan kesempatan yang setara. Kesuksesan kegiatan ini menunjukkan perlunya pelatihan serupa dikembangkan lebih luas dan berkelanjutan, baik oleh institusi pendidikan tinggi maupun lembaga sosial. Keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar pelatihan inklusif ini dapat menjangkau lebih banyak penyandang disabilitas di berbagai daerah. Selain itu, pembelajaran dari kegiatan ini dapat menjadi model untuk replikasi program pelatihan berbasis komunitas di sektor digital. Keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa intervensi yang tepat dan berbasis partisipasi dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Peningkatan keterampilan digital bagi penyandang disabilitas merupakan langkah strategis dalam mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif secara sosial dan ekonomi. Di era transformasi digital yang begitu cepat, literasi digital menjadi syarat utama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas sosial. UNESCO (2020) menekankan pentingnya intervensi digital bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengurangi kesenjangan digital yang memperparah eksklusi sosial. Dalam konteks ini, pelatihan keterampilan digital menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Dengan dukungan teknologi adaptif dan pendekatan inklusif, individu dengan disabilitas mampu mengakses peluang yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Oleh karena itu, program pelatihan digital yang dirancang secara khusus dan inklusif memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan teknologi sebagai jembatan, bukan hambatan, bagi penyandang disabilitas.

Temuan dari kegiatan pengabdian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelatihan digital dapat membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas. Andayani et al. (2022) menemukan bahwa peserta pelatihan digital menunjukkan peningkatan peluang mendapatkan pekerjaan berbasis daring seperti freelance, penginputan data, dan pengelolaan media sosial. Pekerjaan berbasis digital tidak hanya mengurangi hambatan mobilitas, tetapi juga memberikan fleksibilitas waktu bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Bahkan dalam konteks pandemi, pekerjaan digital terbukti menjadi salah satu sektor yang tetap inklusif dan terbuka untuk kelompok rentan. Dalam studi oleh Nugroho et al. (2021), penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan daring cenderung memiliki kepercayaan diri lebih tinggi dalam melamar pekerjaan dibanding yang tidak. Ini menunjukkan bahwa akses

pelatihan digital berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas kerja dan otonomi individu. Oleh sebab itu, pelatihan ini berperan sebagai jembatan penting menuju pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Keberhasilan pelatihan tidak lepas dari penggunaan pendekatan Universal Design for Learning (UDL) yang adaptif terhadap kebutuhan peserta dengan berbagai jenis disabilitas. UDL memungkinkan fleksibilitas dalam penyampaian materi, cara peserta menunjukkan pemahaman, dan cara mereka termotivasi dalam belajar (Rao et al., 2017). Dalam pelaksanaan pelatihan ini, prinsip-prinsip UDL diwujudkan melalui penggunaan materi visual, audio, dan kinestetik yang dapat diakses oleh peserta tunanetra, tunarungu, dan penyandang disabilitas fisik. Penerapan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Al-Azawei et al. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan UDL secara konsisten mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga menciptakan lingkungan belajar yang setara, di mana tidak ada peserta yang merasa tertinggal atau diabaikan. Fasilitator yang memahami dan menerapkan UDL juga dapat menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar sesuai kebutuhan individu. Ini penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas proses pelatihan.

Fasilitas pendukung menjadi komponen penting dalam menjamin keberhasilan pelatihan digital inklusif. Peserta tunanetra, misalnya, sangat terbantu dengan penggunaan perangkat lunak pembaca layar seperti NVDA yang memungkinkan mereka membaca teks di layar komputer melalui suara. Sebaliknya, peserta dengan hambatan motorik menggunakan mouse ergonomis atau perangkat alternatif seperti keyboard adaptif untuk memudahkan pengoperasian komputer. Teknologi asistif ini telah terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran bagi peserta dengan berbagai hambatan (Lazar et al., 2020). Penyesuaian perangkat keras dan lunak sesuai kebutuhan peserta tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri mereka dalam menggunakan teknologi. Pengalaman positif selama pelatihan juga menciptakan persepsi bahwa teknologi adalah sesuatu yang dapat diakses dan dikendalikan, bukan ancaman. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi adaptif menjadi syarat utama bagi suksesnya pelatihan digital bagi penyandang disabilitas. Tanpa perangkat yang sesuai, pelatihan cenderung eksklusif dan gagal menjangkau seluruh peserta.

Peran fasilitator sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan ramah disabilitas. Fasilitator yang telah mendapatkan pelatihan tentang inklusi dan pendekatan UDL lebih mampu mengenali dan menanggapi kebutuhan spesifik peserta. Dalam pelatihan ini, fasilitator tidak hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, dan penengah interaksi sosial antar peserta. Studi oleh Smith & Lowrey (2020) menunjukkan bahwa pelatihan fasilitator secara berkelanjutan berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi aktif peserta disabilitas dalam program pelatihan. Fasilitator juga berperan dalam menciptakan suasana kelas

yang terbuka, empatik, dan mendorong peserta untuk saling membantu. Hubungan interpersonal yang kuat antara fasilitator dan peserta terbukti dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan belajar. Dengan demikian, aspek humanis dalam proses pelatihan tidak kalah penting dibanding aspek teknis.

Namun, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pelatihan ini. Di beberapa sesi, peserta harus bergiliran menggunakan perangkat komputer karena jumlah yang tersedia tidak mencukupi. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil juga menghambat kelancaran akses terhadap materi daring dan praktik langsung. Hambatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan digital tidak hanya tergantung pada kualitas program, tetapi juga pada kesiapan logistik dan dukungan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan temuan dari International Telecommunication Union (2022), yang menyebutkan bahwa kesenjangan akses teknologi masih menjadi kendala utama dalam program inklusi digital di negara berkembang. Jika hambatan ini tidak ditangani secara sistemik, maka pelatihan digital justru berisiko memperkuat ketimpangan akses di kalangan disabilitas. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur dan perangkat yang memadai harus menjadi prioritas dalam program pelatihan inklusif.

Guna mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan kerja sama multipihak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi disabilitas, dan sektor swasta perlu duduk bersama merancang strategi penyediaan fasilitas dan pembiayaan pelatihan. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program, mengingat sebagian besar lembaga pelatihan tidak memiliki kapasitas anggaran jangka panjang. Menurut laporan World Bank (2019), program pelatihan vokasional yang melibatkan sektor swasta cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar dalam hal penempatan kerja dan keterlibatan pasar. Selain itu, kolaborasi dengan perusahaan teknologi juga dapat membuka akses terhadap perangkat dan aplikasi digital yang ramah disabilitas. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan keterampilan digital ini secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektor, pelatihan digital untuk penyandang disabilitas dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelatihan keterampilan digital bagi penyandang disabilitas berbasis pendekatan komunitas dan UDL terbukti berhasil meningkatkan kemampuan teknis, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial peserta. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak kognitif, tetapi juga menciptakan transformasi sosial melalui terbentuknya komunitas belajar digital yang berkelanjutan. Dengan materi yang adaptif dan fasilitator yang terlatih, peserta dapat mengakses teknologi secara lebih mandiri dan produktif. Program ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berpartisipasi dalam dunia digital jika diberikan akses dan dukungan yang sesuai. Keberhasilan ini

menjadi dasar penting dalam mendorong pelatihan serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi inklusi sosial. Tantangan utama masih berkisar pada keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pelatihan. Namun, dengan pendekatan yang tepat, pelatihan digital dapat menjadi alat transformasi sosial yang signifikan bagi kelompok disabilitas.

Daftar Pustaka

- Al-Azawei, A., Serenelli, F., & Lundqvist, K. (2019). Universal Design for Learning (UDL): A content analysis of peer-reviewed journal papers from 2012 to 2015. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 19(1), 29-56.
- Andayani, M., Sari, L. M., & Prasetyo, H. (2022). Pelatihan Digital untuk Disabilitas: Studi Kasus di Daerah Perkotaan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 8(1), 44-58. <https://doi.org/10.1234/jtm.v8i1.2022>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Lazar, J., Goldstein, D. F., & Taylor, A. (2020). *Ensuring Digital Accessibility through Process and Policy*. Amsterdam: Elsevier.
- Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2013). *Methods for Community-Based Participatory Research for Health*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Kusnanto, H., Aulia, F., & Mahardika, D. (2021). Digital Literacy Training for People with Disabilities: An Inclusive Model. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 98-107.
- Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and Practice*. Wakefield, MA: CAST Professional Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rao, K., Ok, M. W., & Bryant, B. R. (2017). A Review of Research on Universal Design Educational Models. *Remedial and Special Education*, 38(3), 153-165.
- Smith, G. E., & Lowrey, K. A. (2020). Professional development for inclusive practices: A review of research on training content and delivery. *Teacher Education and Special Education*, 43(3), 253-271.
- UNESCO. (2020). *Digital Skills Critical for the Inclusion of Persons with Disabilities*. Paris: UNESCO.
- World Health Organization. (2023). *World Report on Disability*. Geneva: WHO.